

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan sementara waktu, dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud tujuan bukan berusaha atau mencari nafkah di tempat yang ia kunjungi, tetapi hanya semata-mata sebagai konsumen dalam menikmati perjalanan tersebut untuk memenuhi keinginan yang bermacam-macam. Hal tersebut dikemukakan oleh Hunziker dan Kraft (1942).

Dengan adanya lalu lintas orang-orang yang melakukan perjalanan wisata, yaitu mereka yang mencari kemakmuran lebih, ternyata akan memberikan dampak terhadap perekonomian di Negara yang di kunjungi. Dengan adanya lalu lintas wisatawan tersebut menjadi keuntungan dan memberi manfaat yang berupa hasil yang bukan sedikit bahkan menjadikan pendapatan utama bagi Negara yang mengembangkan pariwisata sebagai suatu industri di negaranya.

Indonesia adalah Negara yang memiliki potensi wisata keindahan alam dan keragaman budaya yang dapat dijadikan sebagai peluang usaha dalam sektor pariwisata. Munculnya usaha di sektor pariwisata dari pendapatan setiap obyek wisata yang dikunjungi maka akan memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Sektor pariwisata sudah dapat diakui sebagai industri pada abad ini. Hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator, seperti sumbangan terhadap pendapatan dunia dan penyerapan tenaga

kerja. Dengan berbagai karakteristiknya, pariwisata menjadi sektor andalan dalam sebuah pembangunan ekonomi di berbagai dunia.

Setiap daerah diberikan hak untuk mengelola sumber pendapatan yang berupa: ketersediaan Pemerintah dalam menyediakan pendanaan sesuai dengan urusan Pemerintah dan untuk tujuan Pemerintah memiliki tugas untuk menggali potensi-potensi sumber PAD dan Pemerintah dapat menyalurkan pendapatan atau membagi sebagian pendapatan pajaknya kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Otonomi daerah merupakan sistem pemerintah yang paling tepat untuk diterapkan di Indonesia yang mempunyai wilayah yang luas dengan keanekaragaman etnis dan suku bangsa. Dengan diberikannya keputusan kepada daerah untuk membangun sesuai dengan karakter dan kemampuannya sendiri merupakan rangka dalam dasar meletakkan kemandirian daerah untuk melaksanakan roda pemerintahannya sendiri.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah menyatakan bahwa Pemerintah memberikan kesempatan kepada setiap daerah untuk mengelola dengan baik potensi kekayaan alam yang dimiliki agar dapat memberikan hasil secara optimal. Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, setiap daerah dihimbau untuk lebih inovatif dan kreatif dalam mengoptimalkan potensi sumber-sumber PAD. Dengan meningkatnya PAD maka pembangunan daerah tersebut akan lebih maju dan berkembang.

Salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah dengan melakukannya optimalisasi potensi dalam sektor pariwisata. Keterkaitan antara pendapatan asli daerah dengan industri pariwisata berjalan selaras melalui jalur PAD dan bagi hasil pajak/bukan pajak. Menurut Tambunan dalam Badrudin (2001), mengemukakan bahwa industri pariwisata merupakan kepunyaan dari masyarakat daerah (*Community Tourism Development* atau CTD). Dengan melakukannya pengembangan CTD, maka pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pajak serta beragam retribusi resmi dari berbagai macam aktivitas industri pariwisata yang bersifat multisektoral, yang mencakup hotel, restoran, usaha wisata, usaha perjalanan wisata, *profesional convention organizer*, pendidikan formal dan informal, pelatihan dan transportasi.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat diandalkan untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan daerah dan dapat memberikan kesempatan kerja atau memperkecil pengangguran, meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah, dan peran dari pemerintah untuk mengembangkan dan memfasilitasi obyek-obyek wisata maka akan dapat memberikan sumbangan yang besar untuk Pendapatan Asli Daerah. Selain itu peran dari masyarakat sekitar juga akan membantu untuk mengetahui potensi yang ada pada daerah tersebut sehingga akan lebih memudahkan dalam mencapai sasaran utama pembangunan. Tujuan utama dari pengembangan industri pariwisata pada suatu Negara adalah untuk menggali dan meningkatkan

nilai-nilai ekonomi dengan adanya orang-orang yang melakukan perjalanan wisata di Negara tersebut.

Hasil dari keberhasilan pengembangan industri pariwisata, artinya akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian pada suatu daerah, dimana memperhatikan faktor-faktor yang menjadi komponen utama dari industri pariwisata seperti, jumlah wistawan yang berkunjung baik dari wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara, jumlah obyek wisata yang ditawarkan, jumlah hotel dengan berbagai fasilitasnya, dan jumlah restoran dan rumah makan.

Pulau Jawa termasuk salah satu wilayah yang menjadi destinasi wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun nusantara. Berikut adalah tabel jumlah kunjungan wisatawan di Pulau Jawa tahun 2016-2017.

Tabel 1.1
Jumlah Kunjungan Wisatawan di Pulau Jawa
Tahun 2016-2017

Provinsi	Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	
	2016	2017
Banten	16.158.111	21.711.820
DKI Jakarta	35.185.970	38.122.165
Jawa Barat	63.156.760	64.628.105
Jawa Tengah	37.478.700	40.899.577
Jawa Timur	55.183.542	58.934.622
DI Yogyakarta	21.445.343	25.950.793

Sumber: Badan Pusat Statistika dan Dinas Pariwisata dan Budaya

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah wisatawan baik itu mancanegara atau nusantara yang berkunjung ke wilayah Pulau Jawa selalu mengalami peningkatan pada tahun 2016-2017. Provinsi Banten pada tahun

2016 sebanyak 16.158.111 wisatawan meningkat menjadi 21.711.820 wisatawan pada tahun 2017. Pada Provinsi DKI Jakarta juga meningkat dari tahun 2016 sebanyak 35.185.970 wisatawan menjadi sebanyak 38.122.165 wisatawan pada tahun 2017. Pada Provinsi Jawa Barat juga mengalami peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dari tahun 2016 sebanyak 63.156.760 wisatawan terus meningkat pada. Tahun 2017 menjadi sebanyak 64.628.105 wisatawan. Pada Provinsi Jawa Tengah juga mengalami peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dari tahun 2016-2017, puncak wisatawan yang berkunjung pada tahun 2017 sebanyak 40.899.577 wisatawan. Pada Provinsi Jawa Timur juga mengalami peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dari tahun 2016 sebanyak 55.183.542 wisatawan menjadi sebanyak 58.934.622 wisatawan pada tahun 2017. Terakhir pada Provinsi DI Yogyakarta yang juga selalu mengalami peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dari tahun 2016-2017, puncak wisatawan yang berkunjung pada tahun 2017 sebanyak 25.950.793 wisatawan. Dengan cenderungnya peningkatan setiap tahun pada jumlah kunjungan wisatawan seharusnya mampu meningkatkan pendapatan asli daerah pada sektor pariwisata di Pulau Jawa.

Obyek wisata merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Pulau Jawa memiliki banyak tempat wisata yang ditawarkan seperti wisata alam, wisata sejarah, wisata buatan, dan lainnya. Dengan semakin bertambahnya obyek wisata yang ditawarkan maka akan menarik para wisatawan untuk berkunjung, karena wisatawan memiliki pilihan obyek wisata yang banyak untuk mereka

kunjungi. Berikut adalah tabel jumlah obyek wisata di Pulau Jawa tahun 2011-2017.

Tabel 1.2
Jumlah Obyek Wisata di Pulau Jawa
Tahun 2011-2017

Tahun	Jumlah Obyek Wisata (unit)					
	Banten	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	Jawa Timur	DI Yogyakarta
2011	562	290	517	284	765	92
2012	557	304	614	385	765	81
2013	563	314	587	417	767	83
2014	318	318	587	467	772	85
2015	318	318	628	477	784	98
2016	328	318	628	551	784	135
2017	403	320	655	551	784	149

Sumber: Badan Pusat Statistika dan Dinas Pariwisata dan Budaya

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah obyek wisata di Pulau Jawa mengalami fluktuasi dari tahun 2011-2017. Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah obyek wisata tertinggi pada tahun 2011-2017 yakni berjumlah 765 unit pada tahun 2011 dan 2012, 767 unit pada tahun 2013, 772 unit pada tahun 2014, dan 784 unit pada tahun 2015, 2016 dan 2017, sedangkan jumlah obyek wisata terendah dari tahun 2011-2017 terdapat pada Provinsi DI Yogyakarta yakni berjumlah 92 unit pada tahun 2011, 81 unit pada tahun 2012, 83 unit pada tahun 2013, 85 unit pada tahun 2014, 98 unit pada tahun 2015, 135 unit pada tahun 2016, dan 149 unit pada tahun 2017. Dengan semakin banyak obyek wisata yang disediakan pemerintah maka akan semakin banyak juga untuk menarik minat para wisatawan yang berkunjung dan pendapatan daerah sektor pariwisata di Pulau Jawa juga akan meningkat.

Hotel merupakan fasilitas yang dapat menarik para wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Mulai dari hotel berbintang, melati, dan penginapan dengan berbagai macam fasilitas yang ditawarkan dan sesuai dengan kebutuhan ataupun selera para pengunjung, agar merasa senang datang ke daerah tujuan. Berikut tabel jumlah hotel di Pulau Jawa tahun 2011-2017.

Tabel 1.3
Jumlah Hotel di Pulau Jawa
Tahun 2011-2017

Tahun	Jumlah Hotel (unit)					
	Banten	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	Jawa Timur	DI Yogyakarta
2011	246	375	1.584	1.383	1.833	1.106
2012	259	392	1.652	1.441	1.923	1.154
2013	283	400	1.649	1.463	1.890	1.168
2014	298	440	1.681	1.528	1.993	1.138
2015	311	432	1.718	1.533	3.352	1.116
2016	313	437	1.722	1.627	3.397	1.165
2017	384	437	1.722	1.958	3.369	1.179

Sumber: Badan Pusat Statistika dan Dinas Pariwisata dan Budaya

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat bahwa jumlah hotel di Pulau Jawa mengalami peningkatan setiap tahunnya. Provinsi Banten mengalami peningkatan jumlah hotel dari tahun 2011 sebanyak 246 unit menjadi sebanyak 384 unit hotel pada tahun 2017. Pada Provinsi DKI Jakarta juga mengalami peningkatan jumlah hotel dari tahun 2011 sebanyak 375 unit menjadi sebanyak 437 unit pada tahun 2017. Pada Provinsi Jawa Barat juga mengalami peningkatan jumlah hotel setiap tahunnya, hingga pada tahun 2017 jumlah hotel sebanyak 1.722 unit. Pada Provinsi Jawa Tengah juga mengalami peningkatan jumlah hotel dari tahun 2011 sebanyak 1.383 unit menjadi sebanyak 1.958 unit

hotel pada tahun 2017. Sedangkan pada Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan yang cukup signifikan jumlah hotel dari tahun 2011 memiliki sebanyak 1.833 unit menjadi sebanyak 3.369 unit pada tahun 2017. Terakhir pada Provinsi DI Yogyakarta yang juga mengalami peningkatan jumlah hotel pada tahun 2011 sebanyak 1.106 menjadi 1.179 unit pada tahun 2017. Dengan semakin banyaknya jumlah hotel maka akan berdampak memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah sektor pariwisata melalui penerimaan pajak penghasilan.

Restoran dan rumah makan merupakan sarana pendukung yang penting untuk kebutuhan pokok para wisatawan selama berwisata di daerah yang di kunjungi. Berikut tabel jumlah restoran dan rumah makan di Pulau Jawa tahun 2011-2017.

Tabel 1.4
Jumlah Restoran dan Rumah Makan
di Pulau Jawa Tahun 2011-2017

Tahun	Jumlah Restoran dan Rumah Makan (unit)					
	Banten	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	Jawa Timur	DI Yogyakarta
2011	797	1.361	2.775	1.538	765	641
2012	1.039	2.731	2.775	1.728	765	690
2013	1.110	2.269	2.714	1.828	1.682	805
2014	1.110	2.153	2.687	2.697	1.706	1.365
2015	1.147	2.776	2.687	2.752	2.930	1.446
2016	1.147	2.776	2.853	2.847	3.007	1.751
2017	952	2.865	4.895	3.149	3.432	1.477

Sumber: Badan Pusat Statistika dan Dinas Pariwisata dan Budaya

Berdasarkan tabel 1.4 dapat dilihat bahwa jumlah restoran dan rumah makan di Pulau Jawa rata-rata mengalami kenaikan setiap tahunnya. Provinsi Banten memiliki jumlah restoran dan rumah makan yang selalu meningkat pada

tahun 2011-2017 yaitu 797 unit restoran dan rumah makan pada tahun 2011, dan 1.147 unit restoran dan rumah makan pada tahun 2016, namun mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 952 unit. Pada Provinsi DKI Jakarta memiliki jumlah restoran dan rumah makan yang juga selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu sebanyak 1.361 unit pada tahun 2011 dan sebanyak 2.865 unit pada tahun 2017. Pada Provinsi Jawa Barat juga mengalami peningkatan jumlah restoran dan rumah makan yang cukup signifikan dari tahun 2011 sebanyak 2.775 unit terus meningkat pada tahun 2017 menjadi 4.895 unit. Pada Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan jumlah restoran dan rumah makan dari tahun 2011 sebanyak 1.538 unit terus meningkat pada tahun 2017 menjadi sebanyak 3.149 unit. Pada Provinsi Jawa Timur jumlah restoran dan rumah makan meningkat cukup signifikan pada tahun 2017, dari 765 unit restoran dan rumah makan di tahun 2011 menjadi 3.432 unit restoran dan rumah makan di tahun 2017. Sedangkan pada Provinsi DI Yogyakarta memiliki jumlah restoran dan rumah makan pada tahun 2011 sebanyak 641 unit dan meningkat pada tahun 2017 menjadi sebanyak 1.477 unit. Dengan terpenuhinya kebutuhan maka wisatawan akan merasa senang dan memberikan pengaruh yang positif pada pendapatan daerah sektor pariwisata.

Pendapatan Daerah Sektor Pariwisata mengalami peningkatan setiap tahunnya, perkembangan pendapatan sektor pariwisata dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 1.5
Perkembangan Pendapatan Daerah Sektor Pariwisata
di Pulau Jawa Tahun 2016-2017

Provinsi	Pendapaatan Daerah Sektor Pariwisata	
	2016	2017
Banten	34.876.171.743	39.093.159.231
DKI Jakarta	4.622.778.604.113	4.766.985.352.784
Jawa Barat	418.020.553.187	420.327.995.078
Jawa Tengah	262.984.817.326	299.538.612.783
Jawa Timur	249.621.224.770	265.315.829.045
DI Yogyakarta	353.913.365.540	423.146.610.814

Sumber: Badan Pusat Statistika dan Dinas Pariwisata dan Budaya

Berdasarkan tabel 1.5 dapat dilihat bahwa perkembangan pendapatan daerah sektor pariwisata di Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi DI Yogyakarta terus mengalami kenaikan jumlah pendapatan pada tahun 2015-2017. Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016-2017 memiliki jumlah pendapatan daerah sektor pariwisata tertinggi di Pulau Jawa. Dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah yang terus meningkat setiap tahunnya menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah untuk terus membenahi sektor pariwisata telah berhasil.

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan, maka judul penelitian ini adalah **“ANALISIS PENERIMAAN DAERAH DARI SEKTOR PARIWISATA (STUDI KASUS DI PULAU JAWA)”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis akan membuat pembatasan masalah agar penelitian dapat lebih terarah dan fokus. Sehingga dalam penelitian ini, penulis hanya akan membatasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan di beberapa Provinsi di Pulau Jawa dengan 6 Provinsi, diantaranya Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi DI Yogyakarta.
2. Variabel yang diteliti adalah Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata, Jumlah Wisatawan, Jumlah Obyek Wisata, Jumlah Hotel, dan Jumlah Restoran dan Rumah Makan.
3. Penelitian mengambil perbandingan data tahun 2011-2017.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Jumlah Wisatawan mempengaruhi Penerimaan Daerah dari Sektor Pariwisata di Pulau Jawa?
2. Apakah Jumlah Obyek Wisata mempengaruhi Penerimaan Daerah dari Sektor Pariwisata di Pulau Jawa?
3. Apakah Jumlah Hotel mempengaruhi Penerimaan Daerah dari Sektor Pariwisata di Pulau Jawa?
4. Apakah Jumlah Restoran dan Rumah Makan mempengaruhi Penerimaan Daerah dari Sektor Pariwisata di Pulau Jawa?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah di jelaskan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Wisatawan terhadap Penerimaan Daerah dari Sektor Pariwisata di Pulau Jawa.
2. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Obyek Wisata terhadap Penerimaan Daerah dari Sektor Pariwisata di Pulau Jawa.
3. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Hotel terhadap Penerimaan Daerah dari Sektor Pariwisata di Pulau Jawa.
4. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Restoran dan Rumah Makan terhadap Penerimaan Daerah dari Sektor Pariwisata di Pulau Jawa.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat diantaranya:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan dan referensi terkait pada masalah yang diteliti yaitu Penerimaan Daerah dari Sektor Pariwisata di Pulau Jawa pada tahun 2011-2017.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan pembangunan daerah.
- b. Dapat digunakan sebagai bahan referensi dan informasi untuk penelitian selanjutnya.

